

## **Implementasi Kebijakan Perikanan Tangkap dalam Mendukung Kesejahteraan Nelayan di Teluk Bakau Tahun 2023**

**Tito Raman Dhanni<sup>1</sup>, Fitri Nurzana<sup>2</sup>, Dini Oktafiana<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: titodhani223@gmail.com

### **ABSTRAK**

Saat ini pemerintah masih terus melaksanakan program kebijakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Teluk Bakau. Program perikanan tangkap untuk menunjang kesejahteraan masyarakat telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Bakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Penelitian ini mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Bakau, dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh George Edward III sebagaimana dikutip dalam jurnal Yuliah tahun 2020. Keempat indikator tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Perilaku atau Sikap, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan indikator teoritis tersebut maka pembahasan implementasi kebijakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perikanan tangkap untuk mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau tahun 2023 telah berhasil di masyarakat.

**Kata Kunci :** Policy Implementation, Capture Fisheries, Fishermen's Welfare

### **PENDAHULUAN**

Salah satu kepulauan yang ada di Indonesia adalah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau (Kepri) memiliki pulau-pulau kecil dan besar dengan total 2.408 pulau dengan luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 96% merupakan lautan (Kepri, 2022). Diantara pulau-pulau tersebut terdapat satu pulau yang memiliki potensi wilayah laut dan perikanan tangkap. Kabupaten Bintan merupakan daerah yang ada di Provinsi Kepri. Kabupaten Bintan memiliki luas 88.038,54 km<sup>2</sup>., namun luas daratannya hanya 2,21%, atau sekitar 1.946,13 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari ±240 buah pulau besar dan pulau kecil (Bintan, 2021).

Namun dengan luas Kepulauan Riau terdapat salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yaitu Kabupaten Bintan.

Potensi perikanan Kabupaten Bintan cukup besar untuk perikanan tangkap, karena Kabupaten Bintan terletak diposisi yang sangat strategis dan juga menguntungkan. Salah satu lokasi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan terletak di Desa Teluk Bakau. Desa Teluk Bakau merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Bintan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Aktivitas ekonomi masyarakat Teluk Bakau bergantung pada sumber daya pesisir dan laut. Didaerah ini sudah menjadi mayoritas setiap penduduknya yang dikarenakan tempat yang strategis dan juga berdekatan dengan pesisir pantai. Sehingga, rata-rata mata pencaharian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Nelayan merupakan sekelompok orang yang hidupnya bergantung pada hasil laut, baik melalui penangkapan atau budidaya (Munandar, 2020). Orang yang secara aktif terlibat dalam penangkapan ikan disebut nelayan (Hastuti, 2022). Menurut Kusnadi (Magdalena 2017), nelayan adalah komunitas yang tumbuh dan berkembang di daerah transisi antara darat dan laut (Fernanto et al., 2022). Di desa Teluk Bakau nelayan merupakan pekerjaan sehari-hari didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti bahwa pada tahun 2022 tercatat terdapat 290 orang yang bekerja sebagai nelayan di Desa Teluk Bakau. Dalam hal mencukupi kebutuhan pangan, nelayan dan pengelolaan perikanan sama, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini masih berada dalam ketimpangan kesejahteraan sosial (Suprajitno, 2021). Di desa ini sebagian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan masih bergantung kepada kondisi alam, maka sulit bagi nelayan memperoleh kehidupan menjadi lebih baik. Nelayan tradisional juga menghadapi masalah ketidakpastian pendapatan, sarana dan prasarana kurang optimal.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berpartisipasi secara maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk memastikan bahwa masyarakat nelayan menerima bantuan sarana prasarana, serta kegiatan pembinaan, yang akan menguntungkan mereka. Seperti halnya dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DKP Kepri menyebutkan bahwa dalam masalah pokok nelayan bahwa kesejahteraan nelayan belum maksimal dimana Kemampuan masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil dalam mengelola usahanya dan menggunakan teknologi terkini dalam pengembangan usahanya masih sangat rendah (Perikanan, 2015). Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya melaksanakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan serta akses pasar bagi masyarakat nelayan. Seperti yang dikatakan Ahmad Talib dalam penanganan dan pengembangan sektor perikanan, fokus utama harus menjadi industrialisasi pengolahan hasil perikanan (Talib, 2018). Seperti yang tertulis dalam Rencana strategis DKP Kepri, dimana pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pengelolaan hasil tangkapan dan pemasaran hasil olahan dan hasil tangkapan masyarakat nelayan.

#### STUDI KEPUSTAKAAN

Pada tahun 2018, Hilman Malik dan Nur Saribulan melakukan penelitian sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Usaha Perikanan Melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kebijakan perikanan tangkap diterapkan di Kota Tanjungpinang, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan beberapa masalah, termasuk perspektif nelayan yang rendah, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, adanya individu atau

organisasi yang memanfaatkan kepentingan pribadi, dan penggunaan alat tangkap yang terbatas karena Peraturan Menteri Kelautan No. 2 tahun 2015 yang menghalangi akses nelayan ke tempat penampungan ikan (TPI).

Pada tahun 2020, Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan melakukan penelitian sebelumnya tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis bagaimana program pemberdayaan masyarakat miskin dijalankan. Untuk kesejahteraan sosial ekonomi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan program pemberdayaan masyarakat miskin pada komunitas nelayan tradisional. Informan yang digunakan termasuk Kepala Desa Lontar, Sekretaris Desa Lontar, Kaur Kesra Desa Lontar, Ketua KUB Rumput Laut, Ketua Koperasi Nelayan, dan nelayan. Studi ini menemukan bahwa Program pemberdayaan masyarakat miskin, seperti program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri, juga dikenal sebagai "Sekaya Maritim", yang dimulai mulai Februari 2015, memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan nelayan dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih ada.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Michael Mamentu pada tahun 2015 berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kota Manado (Studi Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara) dikemas dalam bentuk program usaha mina perdesaan perikanan tangkap (PUMP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi kelemahan dan

kekurangan proses implementasi kebijakan untuk mengkoreksi pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan PUMP Nelayan Tangkap di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemberdayaan nelayan belum optimal karena faktor-faktor seperti perilaku dan nilai nelayan tidak diperhatikan, sikap pelaksana kebijakan yang lemah, dan kekuatan pedagang besar dalam perdagangan ikan.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif. Tujuan pendekatan kualitatif sendiri adalah untuk mendeskripsikan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang berbeda dari realitas sosial saat ini dan kemudian mencoba mengidentifikasi realitas sebagai karakteristik, sifat, atau fenomena tertentu (Mamentu, 2015). Sehingga, menurut peneliti pendekatan kualitatif sangat pas digunakan dalam melihat implementasi kebijakan yang ada di Desa Teluk Bakau. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang terjadi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka. Untuk mendukung gagasan dan proposisi, metode pengumpulan studi pustaka ini menggunakan metode pencarian sumber dan kontruksi dari berbagai sumber, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya (Miza Nina Adlini et al, 2022). Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi harus dianalisis secara kritis (Ramdan, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana**

Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau tentunya perlu adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah setempat. Peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada dapat dilakukan berupa meluncurkan program-program kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat. Seperti yang telah dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dalam Renstra DKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau. Dimana dalam mendapatkan hasil ini peneliti menggunakan indikator teori dari George Edward III yang peneliti kutip dalam jurnal Yuliah, 2020 untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh DKP terhadap masyarakat nelayan yang ada di Desa Teluk Bakau, dimana hasil penelitian ini yang mengacu pada indikator teori Edward III yaitu;

#### **Komunikasi (Communication)**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti komunikasi antara pemerintah setempat atau Dinas kelautan dan Perikanan sudah berjalan sangat baik. Dimana berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi dari salah satu masyarakat Desa Teluk Bakau bahwa, pemerintah setempat telah membuat program sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang saat ini masih berjalan mengenai sosialisasi pembinaan

tentang pengolahan dan pemasaran ikan, yang sudah dijalankan masyarakat Desa Teluk Bakau seperti mengolah menjadi otak-otak, kerupuk ikan, pempek dan sebagainya. Selain itu juga terdapat sosialisasi tempat pelelangan ikan yang dimana pada saat ini masih dibicarakan oleh DKP kepada masyarakat Desa Teluk Bakau. Hal ini yang menjadi contoh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan program kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Renstra Dinas kelautan dan Perikanan.

#### **Sumberdaya (resources)**

Berdasarkan data dari Renstra DKP Kepri bahwa pada tahun 2021 jumlah sumber daya atau staf pegawai Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepri sebanyak 308 orang. Dimana dengan jumlah staf pegawai tersebut juga telah memiliki bagian-bagian dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan bagian kerja masing-masing staf. Dalam hal ini diharapkan staf pegawai DKP dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi membangun kelautan dan perikanan serta meningkatkan perekonomian daerah dibidang kelautan.

Berdasarkan Renstra DKP Kepri 2021-2026 Dinas kelautan dan Perikanan telah membuat beberapa program kebijakan yang dimana hal ini sebagai tujuan atau sasaran program pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan dan kelautan di provinsi Kepri terutama di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan. Program kebijakan yang telah dijalankan oleh DKP terhadap masyarakat yang ada di Desa teluk Bakau seperti: Pelatihan keterampilan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,

pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, peningkatan nilai dan promosi hasil perikanan dan kelautan; pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan; jaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkapan; pengembangan sistem jaminan dan pengujian mutu hasil perikanan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komponen sumberdaya manusia yang dilakukan oleh staf DKP Provinsi Kepri dalam melaksanakan tugasnya sudah dijalankan dengan baik seperti staf-staf Dinas Kelautan dan perikanan telah menjalankan program-program yang tercantum dalam Renstra kepada masyarakat Desa Teluk Bakau.

### **Tingkah Laku Atau Sikap Pelaksana Kebijakan**

Berdasarkan hasil informasi dari salah satu informan bahwa tingkah laku pemerintah dalam menjalankan program-program di Desa Teluk Bakau sangat baik, dimana pemerintah dan masyarakat saling terbuka satusama lain dalam menjalankan program bersama. Sehingga program-program yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan lancar hingga saat ini, Selain itu keluhan kesah masyarakat setempat ditanggapi sesuai dengan kemampuan dari pemerintah, seperti dalam hal program memberikan bantuan fasilitas menangkap ikan seperti, program yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan kepada masyarakat nelayan Desa Teluk Bakau berupa pemberian kapal fiber 3GT maupun 5 GT dan alat tangkap nelayan.

### **Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)**

Berdasarkan data Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau 2021-2026 bahwa didalam Renstra tersebut telah terdapat struktur organisasi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri yang sudah tersusun secara sistematis yang dimana hal ini dapat digunakan sebagai bentuk menjalankan implementasi kebijakan yang ada di Provinsi Kepri.

Berdasarkan hasil di atas mengenai implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perikanan tangkap yang diusulkan oleh George Edward III telah berjalan dengan baik dalam mendukung kesejahteraan nelayan Desa Teluk Bakau pada tahun 2023. Dengan melihat adanya program-program yang sudah dijalankan pemerintah kepada masyarakat serta respon dan praktik langsung yang dilakukan masyarakat seperti dalam sosialisasi pengelolaan hasil tangkapan dan mempraktikkan dengan mengolah hasil tangkapan dengan berbagai macam makanan.

Perikanan tangkap adalah kegiatan menangkap ikan dilaut bebas dengan menggunakan alat-alat pembantuan penangkapan. Perikanan tangkap adalah penangkapan dan pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan. Tujuan dari perikanan tangkap sendiri yaitu untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang menguntungkan, selain itu perikanan tangkap menggunakan teknologi sederhana dan kompleks (L & Pramulya, 2022). Selain itu sektor perikanan tangkap memiliki peran yang penting, salah satu cara sektor perikanan tangkap membantu meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun usaha nelayan skala kecil (Nirmasari Dian, 2022). Perikanan dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu

bidang yang dapat meningkatkan ekonomi negara, regional, dan lokal (Gumilar & Nuryasin, 2022). Perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan dalam melakukan usaha menangkap ikan, sebagian besar masyarakat masih menggunakan alat tangkap tradisional hanya beberapa yang menggunakan alat-alat modern. Kegiatan perikanan tangkap agar menjadi kegiatan yang menguntungkan bagi negara maupun daerah, haruslah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dengan memberikan kebijakan atau program-program yang mendukung masyarakat nelayan agar lebih baik dalam menghasilkan tangkapan, mengolah dan memasarkan hasil produksi perikanan tangkap demi keberlangsungan hidup masyarakat kedepan menjadi lebih baik. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi kepulauan Riau telah membuat beberapa kebijakan terhadap masyarakat yang ada di Kepri seperti yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Dalam proses pembuatan kebijakan yang telah tertuang di Rencana Strategis DKP Kepri diharapkan telah disesuaikan dengan proses pembuatan kebijakan yang dimana berakhir pada implementasi kebijakan. Sebab dalam pembuatan kebijakan proses implementasi kebijakan menjadi penentu terakhir dalam keseluruhan pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Hasbullah (2015) dalam Eliah Yuliah, adalah proses politik yang terdiri dari serangkaian tahap yang saling bergantung, tahap-tahap ini termasuk penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Yuliah, 2020). Dalam keseluruhan struktur kebijakan, tahapan implementasi kebijakan sangat penting karena proses kebijakan secara keseluruhan dapat memengaruhi

seberapa berhasil atau tidak pencapaian tujuan (Mea, 2022). Implementasi kebijakan adalah proses yang terus berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Yuliah, 2020).

Pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau. Peneliti menggunakan indikator teori George Edward III, yang dikutip dalam jurnal Yuliah, 2020. Edward menyatakan empat faktor atau variable penting untuk implementasi kebijakan publik, yaitu, Komunikasi (communication), Sumber Daya (resources), kecenderungan tingkah laku atau sikap (disposition atau attitude), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Yuliah, 2020).

### **Komunikasi (communication)**

Komunikasi Edward mengatakan 3 komponen utama proses komunikasi kebijakan: transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency)

### **Transmisi**

Sebelum pejabat dapat mengambil tindakan, mereka harus mengetahui bahwa keputusan telah dibuat dan mereka telah diberi wewenang untuk melaksanakannya. Implementasi perintah menghadapi beberapa masalah. Pertama, ada perbedaan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijakan yang mengeluarkan perintah. Kedua, ada banyak tingkat birokrasi yang menghambat penyebaran informasi. Ketiga, para pelaksana seringkali salah memahami persyaratan kebijakan.

### **Kejelasan**

Petunjuk pelaksanaan kebijakan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas

jika ingin dilaksanakan dengan baik. Dalam beberapa situasi, para pelaksana mungkin tidak benar-benar memahami tujuan suatu kebijakan atau persyaratan operasionalnya; dalam situasi lain, mereka bahkan mungkin berusaha menggunakan kekaburan untuk memanfaatkan kepentingan mereka sendiri. Karena tidak ada kejelasan, perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dapat terjadi.

### **Konsistensi**

Perintah untuk menerapkan kebijakan harus konsisten dan jelas jika implementasinya ingin berhasil. Jika tidak, pelaksana kebijakan akan kesulitan melakukan tugas mereka. Sebaliknya, mereka akan dipaksa untuk mengambil sikap yang sangat leluasa terhadap interpretasi dan pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pelaksana lebih cenderung mengabaikan atau mendistorsi kebijakan jika itu bertentangan dengan kepentingan atau pilihan mereka. Sumberdaya adalah komponen dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumberdaya termasuk staf yang memadai dengan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul ke dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan pelayanan publik.

### **Kecenderungan Tingkah Laku atau Sikap (disposition atau attitude)**

Kecenderungan ini terjadi karena para implementor memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak cukup jika tidak ada niat dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Edward menyatakan bahwa banyak kebijakan memasuki "zona ketidakacuhan". Pelaksana kebijakan mendukung beberapa kebijakan, yang membuatnya efektif; namun,

kepentingan individu atau organisasi pelaksana kebijakan dapat bertentangan dengan kebijakan lain.

### d) Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)

Bahkan secara keseluruhan, birokrasi adalah salah satu lembaga yang paling sering melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi birokrasi. Panduan kegiatan yang konsisten, yang dapat digunakan oleh setiap implementator, merupakan komponen struktur yang sangat penting bagi setiap organisasi.

## **KESIMPULAN**

Komunikasi, komunikasi antara pemerintah setempat atau Dinas kelautan dan Perikanan sudah berjalan sangat baik. Dimana pemerintah setempat telah membuat program sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang saat ini masih berjalan mengenai sosialisasi pembinaan tentang pengolahan dan pemasaran ikan dan sosialisasi tempat pelelangan ikan yang saat ini masih dibicarakan oleh DKP dan masyarakat. Hal ini yang menjadi contoh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan program kebijakan. Sumberdaya, komponen sumberdaya manusia yang dilakukan oleh staf DKP Provinsi Kepri dalam melaksanakan tugasnya sudah dijalankan dengan baik seperti staf-staf Dinas Kelautan dan perikanan telah menjalankan program-program yang tercantum dalam Renstra kepada masyarakat Desa Teluk Bakau. Tingkah Laku atau Sikap, tingkah laku pemerintah dalam menjalankan program-program di Desa Teluk Bakau sangat baik, dimana pemerintah dan masyarakat saling terbuka satusama lain dalam menjalankan

program bersama. Selain itu keluhan masyarakat setempat ditanggapi sesuai dengan kemampuan dari pemerintah. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini sudah dijelaskan dengan baik, dimana sudah digambarkan bagan struktur organisasi DKP sesuai dengan bidang-bidangnya sehingga dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan kelautan dan Perikanan lebih optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perikanan tangkap di Desa Teluk Bakau telah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator teori Edward III yaitu dalam mendukung kesejahteraan nelayan Desa Teluk Bakau pada tahun 2023. Dengan melihat adanya program-program yang sudah dijalankan pemerintah kepada masyarakat serta respon baik dari masyarakat.

## REFERENSI

- Bintan, P. K. (2021). *Pemerintah Kabupaten Bintan | Portal Pemerintah Kabupaten Bintan*. <https://bintankab.go.id/visimisi>
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Gumilar, G. G., & Nuryasin, H. (2022). Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 273–282. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.612>
- Hastuti, I. D. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan*. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19490/SKRIPSI\\_IRA\\_DWI\\_HASTUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19490/SKRIPSI_IRA_DWI_HASTUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Kepri, P. (2022). *Tentang Kepri* (p. 1). <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>
- L, I. A., & Pramulya, R. (2022). Analisis Saluran Pemasaran Perikanan Tangkap Di Kecamatan Samatiga. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 69–75. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13414>
- Mamentu, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), 53–59.
- Mea, A. I. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK. *Journal Of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 168–182. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3497>
- Miza Nina Adlini et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Munandar, T. A. M. & D. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Komunitas Nelayan Tradisional untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 126–133. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewFile/9252/6030>
- Nirmasari Dian, B. M. (2022). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Wara Timur

- Kota Palopo Strategies Increasing the Welfare of Traditional Fishers in Wara Timur District, Palopo City. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, 2(1), 29–37.
- Perikanan, D. kelautan dan. (2015). Rencana Strategis. In *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*.  
<https://doi.org/351.077> Ind r
- Ramdan, D. F. (2023). Transformasi Manageria Transformasi Manageria. *Journal Of Islamic Education Management*, 3(2), 248–257.  
<https://doi.org/10.47476/manageria.v3i2.3463>
- Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 1.  
<https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372>
- Talib, A. (2018). Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 19.  
<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.19-27>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.